

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab yang terakhir ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan penulis merupakan jawaban dari setiap rumusan masalah. Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai perbandingan Ikhwanul Muslimin Mesir 1928-1949 dengan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia 1998-2009. Maka terdapat delapan hal yang ingin penulis simpulkan.

Pertama, Ikhwanul Muslimin Mesir lahir sebagai respon atas segala kemunduran Kaum Muslimin dalam berbagai aspek kehidupan. Ikhwanul Muslimin berdiri pada tahun 1928 di kota Isma'iliyah, Mesir. Ikhwanul Muslimin menyeru kepada kebangkitan umat Islam, persatuan umat Islam, dan mendorong umat Islam untuk melawan segala bentuk penjajahan yang saat itu sedang merajalela di negeri-negeri Kaum Muslimin. Selain itu, Ikhwanul Muslimin Mesir senantiasa membimbing umat dalam hal pembentukan akhlak yang baik, mendekatkannya kepada agama Islam, serta menasehati penguasa untuk memerintah sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera bermula dari gerakan bawah tanah yang biasa disebut sebagai Gerakan Tarbiyah. Gerakan ini muncul seiring dengan derasny arus pemikiran Islam di Timur Tengah yang masuk ke Indonesia. Gerakan Tarbiyah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Seperti halnya gerakan Islam di Timur Tengah, Gerakan Tarbiyah lahir untuk merespon kemunduran dan ketertindasan umat Islam khususnya di Indonesia oleh rezim yang berkuasa saat itu. Ketika meletusnya reformasi 1998, kader-kader Gerakan Tarbiyah membentuk Partai Keadilan (PK). Namun perolehan suara PK pada Pemilu 1999 tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan *Electoral Treshold* sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu 2004. Untuk menyikapi hal ini maka DPP

PK membentuk partai baru yang bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun tidak membubarkan PK. PKS didirikan pada tanggal 20 April 2002. Pada tahun 2003, PK melebur dengan PKS. Seluruh hak milik PK menjadi hak milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. PKS dapat disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum pada tanggal 17 Juli 2003.

Ketiga, pemikiran politik Ikhwanul Muslimin Mesir 1928-1949 memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pemikiran politik Partai Keadilan Sejahtera. Ketika masih bernama Partai Keadilan, pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin Mesir seperti hubungan Islam dan politik, keterkaitan antara dakwah dan politik, pemikiran mengenai konsep perbaikan, serta pemikiran mengenai pembentukan Negara Islam dan Kekhalifahan tertancap kuat dalam pemikiran kader-kader Partai Keadilan. Tetapi setelah berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera, terdapat beberapa perubahan dalam pemikiran politik yang terkesan pragmatis. Misalnya perubahan pemikiran dalam memandang perlu atau tidaknya sebuah Negara Islam dan Khilafah Islamiyah. Jika pada masa Partai Keadilan, eksistensi Negara Islam dan Khilafah Islamiyah itu dianggap penting, maka Partai Keadilan Sejahtera memandang pentingnya nilai-nilai universal Islam dan fungsi-fungsi dari Negara Islam dan Kekhalifahan itu sendiri tanpa mempermasalahkan bentuk negaranya seperti apa.

Keempat, Ikhwanul Muslimin Mesir 1928-1949 dengan segala idealisme politiknya, gerakan ini dapat dipastikan mengarah kepada pembentukan sebuah Negara Islam, dimana Al-Quran dan Sunah menjadi dasar negara dan Syariat Islam menjadi hukum negara. Selain itu, pembentukan Khilafah Islamiyah yang akan menyatukan seluruh dunia Islam, merupakan cita-cita tertinggi Ikhwanul Muslimin Mesir 1928-1949. Namun kondisi masyarakat Mesir saat itu banyak menganut paham sekularisme sehingga cita-cita mendirikan Negara Islam dan Khilafah tidaklah mudah. Kondisi seperti ini hampir serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, dimana ada sekelompok gerakan Islam yang mencita-citakan pendirian Negara Islam dan Khilafah mengalami kesulitan ketika harus

berhadapan dengan beberapa lapisan masyarakat yang menganut paham sekularisme.

Kelima, terdapat dua arah politik yang berbeda antara Partai Keadilan (1998-2003) dengan Partai Keadilan Sejahtera (2003-2009). Partai Keadilan bersifat ideologis dan eksklusif. Meskipun tidak terlalu nampak di depan publik, namun cita-cita mengenai pembentukan Negara Islam dan Khilafah Islamiyah hangat dibicarakan di dalam forum-forum resmi partai serta dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini karena di dalam tubuh Partai Keadilan didominasi oleh kubu *harakah* yang terkenal ideologis. Namun setelah Partai Keadilan melebur dengan Partai Keadilan Sejahtera, dominasi di dalam tubuh partai kini digantikan oleh kubu *hizb* yang pragmatis. Akhirnya, gagasan-gagasan mengenai pembentukan Negara Islam dan Khilafah Islamiyah tidak lagi dapat dirasakan oleh masyarakat. Partai berubah arah politik menjadi pragmatis. Membesarkan partai adalah lebih utama ketimbang masalah ideologi. Partai yang semula eksklusif kini menjadi inklusif. Siapa pun boleh menjadi kader Partai tanpa membedakan agama. Padahal, Partai Keadilan merupakan partai dengan kaderisasi yang ketat, yaitu dengan menjalani proses *tarbiyah* yang diadopsi dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Namun yang perlu diketahui, bahwa kubu *harakah* sampai saat ini masih eksis di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera meskipun tidak mendominasi. Tokoh-tokoh PKS yang terdapat dalam kubu *harakah* diantaranya adalah ideolog PKS Abu Ridho, Untung Wahono, dan Mutamimmul Ula. Sementara tokoh-tokoh PKS dalam kubu *hizb* diantaranya adalah Hilmi Aminuddin, Anis Matta dan Fahri Hamzah.

Keenam, Ikhwanul Muslimin Mesir 1928-1949 bergerak di luar parlemen, membina masyarakat agar terbentuk masyarakat yang Islami, senantiasa menasehati penguasa agar memerintah sesuai dengan Syariat Islam, melakukan perlawanan terhadap penjajah, dan mengkritik partai politik yang ada saat itu karena kerakusannya akan kekuasaan. Meskipun demikian, sebenarnya Ikhwanul Muslimin Mesir tahun 1928-1949 menjadikan lembaga legislatif dan eksekutif sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini sebagaimana yang

dikemukakan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna. Menurut Al-Banna, dengan masuknya kader-kader Ikhwanul Muslimin ke dalam pemerintahan (legislatif dan eksekutif) akan memudahkan Ikhwanul Muslimin untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersumber pada Syariat Islam, menerapkan hukum-hukum Islam serta menjadikan Islam sebagai satu-satunya landasan negara. Tetapi kondisi perpolitikan di Mesir tahun 1928-1949 tidak memungkinkan untuk Ikhwanul Muslimin untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Ketujuh, Partai Keadilan Sejahtera 1998-2009 bergerak di dalam parlemen selain bergerak juga di luar parlemen. Di dalam parlemen, partai senantiasa berusaha menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan pro rakyat. Parlemen dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya merupakan sarana bagi PKS untuk mewujudkan cita-citanya. Selain itu, parlemen dan birokrasi kenegaraan merupakan area dakwah para kader Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Pertimbangan Partai yang diketuai oleh K.H. Hilmi Aminuddin. Menurutnya, salah satu orbit dakwah PKS adalah orbit pelembagaan (*mihwar muasasi*). Disini para kader dakwah mulai masuk ke dalam lembaga publik, baik di parlemen, birokrasi maupun lembaga profesi lainnya. Misi utama kader dakwah naik secara vertikal dan melakukan penetrasi ke dalam lembaga-lembaga publik ini adalah untuk mempengaruhi, menerjemahkan, atau merumuskan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan lembaga-lembaga tersebut. Usaha-usaha ini kemudian didorong oleh usaha-usaha lainnya di luar parlemen. Di area ini partai beraktivitas membina masyarakat agar terbentuk masyarakat yang Islami.

Kedelapan, Partai Keadilan Sejahtera 1998-2009 memang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin Mesir 1928-1949. Meskipun demikian, antara Ikhwanul Muslimin Mesir 1928-1949 dengan Partai Keadilan Sejahtera 1998-2009 sangatlah berbeda meskipun terdapat beberapa kesamaan. Ikhwanul Muslimin 1928-1949 bersifat ideologis dalam berpolitik. Hal ini bisa kita lihat dalam perkataan serta sikap Hasan Al-Banna sebagai figur utama

Ikhwanul Muslimin. Memang Hasan Al-Banna memiliki pemikiran yang cenderung moderat, tetapi moderat disini bukan berarti pragmatis. Moderat disini maksudnya bahwa Hasan Al-Banna tidak menyerukan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya dan mencoba membuka diri terhadap nasionalisme serta demokrasi dengan menyaringnya terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Dalam perkembangannya tahun 1928-1949, Ikhwanul Muslimin Mesir terlihat konsisten dengan pemikirannya tersebut. Meskipun di Mesir kultur Islam sangat dominan, tetapi kondisi masyarakat Mesir pada saat itu jauh dari nilai-nilai Islam dan lebih dekat dengan nilai-nilai Barat. Oleh karena itu, boleh dikatakan dalam hal ini Ikhwanul Muslimin berani tampil “melawan arus”. Hasilnya, Ikhwanul Muslimin harus beberapa kali berhadapan dengan pemerintah Mesir. Namun demikian, wataknya yang ideologis dan idealis membuat Ikhwanul Muslimin banyak dicintai oleh Kaum Muslimin. Ini terbukti dari semakin banyaknya anggota Ikhwan dan meluasnya pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin sampai keluar Mesir bahkan hingga ke Indonesia.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mencoba mengemas pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Meskipun penganut Islam di Indonesia adalah mayoritas, tapi masyarakat Indonesia sangat menjaga budaya-budaya warisan leluhurnya. Selain itu, heterogenitas agama juga menjadi salah satu warna dalam masyarakat Indonesia. Dalam memahami kenyataan seperti ini, Partai Keadilan Sejahtera mengambil langkah cerdas dalam hal membesarkan partai. Partai Keadilan Sejahtera terlihat lebih fleksibel dalam mengembangkan paham Ikhwanul Muslimin. Partai Keadilan Sejahtera menyesuaikan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin tersebut dengan situasi, kondisi, serta budaya di Indonesia. Sikap seperti ini bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan dan pokok-pokok pikiran para elit PKS seperti Hidayat Nurwahid dan Anis Matta. Namun disisi lain hal ini justru sedikit demi sedikit mulai melunturkan watak ideologis partai. Akhirnya, partai menjadi terlihat cenderung bersifat pragmatis dalam berpolitik. Disatu sisi boleh dikatakan PKS cerdas dalam merebut hati masyarakat

Indonesia secara umum, tetapi disisi lain PKS justru kehilangan citranya sebagai partai dakwah yang ideologis.

B. Saran

Pertama, untuk lembaga UPI, tulisan ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai perbandingan gerakan Islam. Untuk jurusan pendidikan sejarah, tulisan ini dapat memperkaya penulisan dan sumber bacaan terutama sejarah Islam modern di Timur Tengah dan di Indonesia serta dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam kedua gerakan Islam ini.

Kedua, penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru mengenai sejarah pemikiran khususnya mengenai pemikiran Islam dan juga dapat dijadikan sumber bacaan dan sumber rujukan bagi para pelajar yang membacanya. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi peserta didik di SMA pada Kompetensi Dasar “Merekonstruksi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi, menyajikan dalam bentuk tulisan”.

Ketiga, penelitian mengenai perbandingan Ikhwanul Muslimin Mesir dengan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia di Indonesia dalam bidang pemikiran politik ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.

Keempat, bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama. Masih banyak kajian mengenai perbandingan antara Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia yang dapat diteliti lebih lanjut. Misalnya penelitian secara mendalam mengenai perbandingan kedua gerakan Islam tersebut dalam hal keorganisasian atau dalam hal pembinaan kadernya. Selain itu, masih banyak aspek-aspek lain yang dapat diteliti lebih lanjut. Berhubung di jurusan pendidikan Sejarah UPI, penelitian mengenai perbandingan Ikhwanul Muslimin Mesir dengan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia belum banyak dikaji oleh mahasiswa pendidikan sejarah

UPI, maka masih banyak peluang bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian itu.